

KIPRAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN SINJAI PASCA KEKALAHAN PADA PEMILU 2009

Oleh:
Muhammad Lutfi
STISIP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009. Kiprah partai politik didasarkan pada upaya partai untuk membentuk opini dan wacana publik dalam rangka mencitrakan diri di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang mengalami penurunan suara yang signifikan dalam pemilihan umum Tahun 2009, dibutuhkan upaya partai untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya pencitraan partai politik adalah dengan mengenalkan simbol-simbol partai secara kelembagaan di masyarakat. Pengenalan simbol-simbol ini dapat melalui kiprah partai dalam politik di tingkat lokal serta kiprahnya di dalam masyarakat. Sehingga dengan itu, akan menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan keberadaan partai tersebut. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tersebut tidak hanya sebatas pada figur-figur tertentu di dalam partai, tetapi masyarakat memahami partai tersebut berdasarkan ideologi, program dan visi misi partai secara kelembagaan.

Kata Kunci: pelembagaan partai, Partai Golkar, *reification*

PENDAHULUAN

Partai politik dalam sistem pemerintahan demokratis berfungsi sebagai representasi dari kepentingan warga negara melalui anggotanya yang duduk dalam lembaga legislatif yang dipilih lewat pemilihan umum (pemilu). Partai politik juga berperan penting dalam proses penentuan kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sementara itu, pada level daerah dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah, partai politik menjadi wadah untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung dalam Pemilukada. Dengan tugas dan fungsinya tersebut, partai politik dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas organisasinya, melalui pembenahan secara internal maupun eksternal.

Dengan tugas dan fungsi demikian, partai politik selayaknya dibangun dengan penataan yang baik dari sisi kelembagaan. Namun demikian, keberadaan partai politik sebagai salah satu elemen penting dalam tatanan negara demokratis sampai saat ini masih menyisakan berbagai problem. Partai politik di Indonesia yang sejatinya menjadi pionir dalam mewujudkan tatanan demokrasi pasca reformasi, dalam kenyataannya hanya berorientasi untuk mencari kedudukan dan kekuasaan. Seperti yang digambarkan oleh Sutoro Eko (2006, hh. 16-18) yang mengungkapkan bahwa partai politik di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang membawa manfaat bagi kepentingan rakyat. Hal itu menurutnya setidaknya disebabkan oleh 5 (lima) hal, yakni : *pertama*, perjalanan partai politik diwarnai oleh “patahan-patahan sejarah” partai. Di tengah-tengah patahan itulah partai-partai tumbuh dan menghilang silih berganti. *Kedua*, terbentuknya jurang yang lebar antara partai politik dengan masyarakat akibat warisan kebijakan massa mengambang dan praktek korporatisme orde baru. *Ketiga*, partai politik di Indonesia lebih kental dengan personalitas para elitnya (personalisme) ketimbang sebagai organisasi yang mengakar ke bawah. *Keempat*, partai politik lebih digerakkan oleh politik identitas yang sektarian

ketimbang oleh ideologi dan perjuangan kelas. Dan *kelima*, keptaarian di Indonesia jauh dari budaya oposisi.

Partai politik juga cenderung tidak berusaha untuk menjadi penentu jalannya pemerintahan, tetapi terkadang hanya menjadi “penonton” dari proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif). Padahal dari sisi kelembagaan, partai politik harus punya kompetensi dalam proses pembuatan kebijakan. Sejauh ini, fungsi partai politik hanya diwacanakan sebagai institusi perwakilan rakyat, bukan sebagai institusi pembuatan kebijakan (Santoso 2006, h. 36). Sehingga keberadaan partai dalam proses perumusan kebijakan hanya diserahkan kepada segolongan orang-orang partai yang ada di lembaga perwakilan. Akibatnya, para aktivis partai merasa bahwa misi partai politik telah selesai ketika telah berhasil mendudukkan wakilnya di legislatif.

Hal inilah kemudian yang membuat kepercayaan publik terhadap partai politik maupun figur-figur yang ada di dalamnya menjadi melemah. Ini akan berdampak pada menurunnya simpati dan kepercayaan publik kepada partai politik, yang berimbas pada dukungan publik terhadap partai pada pelaksanaan pemilu. Padahal dengan sistem politik saat ini, banyaknya partai politik yang berkompetisi membuat persaingan antar partai semakin kompetitif. Sementara sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka, membuat persaingan tidak hanya antar partai, namun juga antar kandidat dalam internal partai. Dengan kondisi ini, pelembagaan partai politik yang mapan menjadi penting, baik dalam upaya untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu, maupun untuk ikut serta dalam proses perumusan kebijakan publik.

Konsep pelembagaan partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya seperti yang diuraikan oleh Randall & Svasand (2002) menekankan pada 4 (empat) dimensi, yaitu (1) dimensi kesisteman (*systemness*) yakni proses di mana pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik, (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) terkait dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial pendukungnya, (3) derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat), dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) yang merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat.

Penelitian ini kemudian difokuskan untuk meneliti pelebagaan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Sinjai pada dimensi pengetahuan publik (*reification*) yang bermakna bahwa keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Dalam hal ini terkait dengan imajinasi publik terhadap keberadaan partai yang didasarkan atas fakta dan informasi yang ada akan eksistensi partai tertentu. Keberadaan partai politik akan senantiasa tertanam dalam imajinasi publik ketika partai mampu meyakinkan publik melalui kegiatan nyata yang selalu selaras dengan visi dan platform partai tersebut. Begitu pula sejauhmana partai tersebut secara terus menerus memperkenalkan simbol-simbol partainya kepada publik melalui berbagai kegiatan ataupun cara-cara tertentu yang dapat meyakinkan publik akan keberadaan partai tersebut.

Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dijadikan sebagai objek kajian mengacu pada beberapa alasan. *Pertama*, Partai Golkar merupakan partai tua yang menurut beberapa penelitian sebelumnya memiliki tingkat pelebagaan yang cukup mapan di level nasional. Sehingga dalam penelitian ini ingin mengukur pelebagaan Partai Golkar di level lokal, yakni di Kabupaten Sinjai. *Kedua*, Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pada 2 (dua) kali Pemilu legislatif pasca orde baru (Pemilu 1999 dan 2004) masih menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD. Namun sejak itu pula Partai Golkar justru mengusung calon Bupati dari luar partai. *Ketiga*, pada Pemilu Legislatif 2009 justru mengalami penurunan suara yang signifikan yang dibarengi dengan kekalahan dalam perolehan kursi di legislatif daerah (DPRD Sinjai).

Momentum kekalahan dan penurunan dalam perolehan kursi yang dialami oleh Partai Golkar Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2009 inilah yang kemudian menjadi unit analisis dalam studi ini. Dalam artian bahwa studi ini lebih memfokuskan untuk mengkaji upaya Partai Golkar Kabupaten Sinjai melakukan pelebagaan partai pasca kekalahannya pada Pemilu 2009 melalui upaya partai berkiprah dalam politik lokal dan di tengah-tengah

masyarakat untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin di mata publik.

Beberapa tulisan sebelumnya tentang Partai Golkar pasca reformasi telah dilakukan oleh Akbar Tanjung (2006), Suryadinata (2007), Syafarani (2008), dan Tomsa (2007). Di mana dari hasil penelitian tersebut mereka mengungkapkan bahwa pada tataran nasional pelebagaan Partai Golkar merupakan salah satu partai yang cukup mapan. Hal tersebut ditandai dengan tetap *survivenya* (*meminjam istilah Akbar Tanjung*), Partai Golkar di tengah kecemasan dan kritikan yang dialamatkan kepadanya pasca runtuhnya orde baru. Sehingga secara teoritis diharapkan tulisan ini akan melihat dan menggambarkan pelebagaan Partai Golkar di tingkat lokal. Walaupun tulisan ini sama sekali tidak bermaksud untuk menyajikan pengukuran pelebagaan partai politik di tingkat lokal berlaku umum di seluruh daerah di Indonesia.

Selanjutnya secara praktis akan berusaha mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dalam pelebagaan partainya. Mengingat bahwa dalam setiap pelaksanaan pemilu, Partai Golkar di Kabupaten Sinjai senantiasa menjadi partai peraih kursi terbanyak di parlemen daerah. Begitu pula, pada Pilkada 2008, partai ini merupakan pengusung Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun pada Pemilu 2009 justru mengalami “degradasi” perolehan kursi dan suara yang sangat signifikan.

Bertitik tolak dari kajian sebelumnya yang diuraikan di atas, maka studi ini dilakukan berbeda. Studi yang dilakukan ini difokuskan pada pelebagaan Partai Golkar di daerah dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sinjai. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini mengungkap pelebagaan partai Partai Golkar di level lokal ditinjau dari salah satu dimensi pelebagaan partai politik yakni dimensi pengetahuan publik (*reification*). Meskipun nantinya tidak bermaksud untuk mengukur hasil penelitian ini berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat pasca kekalahan pada Pemilu 2009?

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat pasca kekalahan pada Pemilu 2009.
2. Untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat pasca kekalahan pada Pemilu 2009.

KERANGKA TEORI

Partai Politik

Kehadiran partai politik dalam suatu negara yang demokratis merupakan suatu keharusan, karena keberadaannya merupakan salah satu instrumen utama demokrasi. Partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi politik masyarakat serta akan diharapkan menjadi pengendali pemerintah dalam mengelola hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Ramlan Surbakti (2010, h. 144) mengemukakan bahwa asal usul partai politik berasal dari tiga teori yaitu : Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem politik mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat yang luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Menurutnya, ciri-ciri partai politik adalah berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan serta turut dalam pemilihan umum.

Definisi tentang partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Sigmund Neumann (dikutip dalam Miriam Budiarmo 2007, h. 404) mengemukakan bahwa “Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Dalam pengertian ini, nampaknya Neumann menekankan pentingnya penanaman ideologi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan politik untuk mendapatkan dukungan. Karena dalam usaha meraih kekuasaan politik, golongan lain yang memiliki ideologi berbeda juga akan melakukan hal yang sama.

Sementara itu, Sartori (dikutip dalam Miriam Budiarmo 2007, h. 404) lebih menekankan pada aspek penempatan calon-calon dari partai politik dalam menduduki jabatan publik. Jabatan publik tersebut didapatkan dengan cara-cara yang konstitusional yakni melalui pemilihan umum. “Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at election, and is capable of placing through elections candidates for public office*)”.

Secara umum, Riswandha Imawan mengemukakan bahwa pada dasarnya definisi-definisi mengenai partai politik memiliki kesamaan ciri, yakni : *pertama*, kumpulan orang-orang se ide dan berupaya mewujudkan ide-ide tersebut. *Kedua*, memiliki organisasi yang rapi, yang memiliki kontinuitas kegiatan sepanjang tahun. *Ketiga*, berupaya menyusun agenda kebijakan, serta berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan atas agenda tersebut. *Keempat*, berambisi menempatkan wakil-wakilnya dalam jajaran pemerintahan untuk mewujudkan ide-idenya (dikutip dalam Ratnawati 2006, h. 2)

Berdasarkan beberapa pengertian partai politik di atas, partai politik pada hakekatnya mempunyai kemampuan penetrasi (penguasaan jabatan publik) tidak hanya dalam konteks orientasi jabatan publik atau yang kemudian disebut *office*, melainkan juga dalam orientasi *to drive public policy*. Untuk itu, secara umum fungsi partai politik adalah representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen, pemilihan pemimpin,

pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah (Macridis 1996, h. 26).

Pelebagaan Partai Politik

Pelebagaan partai politik merupakan tahap akhir dari pembangunan sebuah partai politik. Konsep ini mensyaratkan pondasi-pondasi yang sebelumnya ada, dan mensyaratkan pembangunan secara bertahap. Huntington (2003, hh. 489-497) menguraikan bahwa proses pembangunan partai biasanya berkembang melalui empat tahapan penting: Pertama, faksionalisme (pengelompokan). Tahap ini ditandai dengan partisipasi dan pelebagaan politik yang masih rendah. Politik melibatkan sejumlah kecil orang yang bersaing satu sama lain dengan struktur dan daya tahan yang lemah. Kedua, polarisasi (pemisahan). Polarisasi terjadi karena dorongan perluasan basis peran serta politik serta memantapkan hubungan antar faksi-faksi politik dengan peningkatan kekuatan-kekuatan sosial. Ketiga, ekspansi (perluasan). Partai politik yang kuat akan menghimbau seluruh lapisan masyarakat, mengikat, serta mempersatukan mereka melalui organisasi yang efektif. Dan cara yang bisa dilakukan ialah dengan menggusur sistem yang berlaku, mengendalikan sistem tersebut, ataupun menerobos masuk ke dalamnya. Keempat, ialah institusionalisasi (pelebagaan).

Selanjutnya Huntington (2003, hh. 16-28) mengemukakan bahwa pelebagaan adalah proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabilitas (*Institutionalization is the process by which organizations and procedures acquire value and stability*). Menurutnya, ada 4 (empat) aspek utama yang menjadi ciri partai yang telah terlebaga, yaitu *pertama*, *adaptability*; dimaknai bahwa semakin mudah suatu organisasi atau tata cara menyesuaikan diri, semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya. Hal ini dapat diukur melalui perhitungan kronologis, usia generasi serta segi fungsi. *Kedua*, kompleksitas; diartikan bahwa semakin kompleks suatu organisasi, akan semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya. *Ketiga* otonomi; otonomi lembaga politik diukur dari tingkat sejauhmana lembaga itu memiliki kepentingan dan nilai-nilai lembaga serta kekuatan sosial lainnya. *Keempat*, keterpaduan; dimaknai bahwa semakin terpadu dan utuh suatu organisasi, semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya; dan sebaliknya semakin terpecah-pecah organisasi, semakin rendah pula tingkat pelebagaannya.

Selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Mainwaring dan Torcal bahwa ada 3 (tiga) kerangka isu utama dalam melakukan institusionalisasi partai, yakni *electoral volatility*, *ideological voting*, dan *personalism* (S2 PLOD UGM, 2008).

Tabel 1. Kerangka Isu Institusionalisasi Partai

Isu	Penjelasan
<i>Electoral volatility</i>	Institusionalisasi dipahami sebagai gerak yang stabil dari perolehan suara partai. Ini ditandai dengan tingginya “kesetiaan” (rendahnya tingkat perpindahan suara) dari masyarakat dalam memberikan suaranya

	kepada partai yang sama (atau partai yang secara program atau ideologi berdekatan). Penanda lainnya juga bisa dilihat dari rendahnya tingkat penyeberangan elit-elit politik dari satu partai ke partai lainnya.
<i>Ideological voting</i>	Institusionalisasi dipahami sebagai gerak yang stabil atau konsisten dari program dan ideologi partai. Jika pun terjadi pergeseran, maka ini berjalan dalam proses yang transisional dan tidak terlalu jauh dari yang diusung sebelumnya. Ideologi dapat diukur melalui program dan perilaku politik dari partai dalam merespon setiap situasi. Selain itu, institusionalisasi dimaksudkan untuk mendorong rasionalitas preferensi politik masyarakat untuk memberikan suaranya atas dasar pertimbangan program partai.
<i>Personalism</i>	Institusionalisasi dipahami sebagai menguatnya organisasi partai terhadap kecenderungan munculnya personalisme dalam partai. Personalisme akan menyebabkan partai tergantung pada sosok atau kharisma individual (khususnya pemimpin partai). Oleh karena itu, agenda institusionalisasi partai harus disertai dengan upaya depersonalisasi.

Dengan merujuk dari beberapa dimensi pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Huntington, Panebianco, dan Kenneth Janda, selanjutnya Vicky Randall dan Lars Svasand (2002, h. 12) kemudian merumuskan bahwa “pelebagaan partai politik dipahami sebagai proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*process by which the party becomes established in terms both of integrated patterns of behaviour and of attitudes, or culture*)”.

Lebih lanjut keduanya mengelompokkan pelebagaan partai menjadi 4 (empat) dimensi, yaitu sebagai berikut :

Dimensi Keptaraan	<i>Internal</i>	<i>Eksternal</i>
Structural (Struktural)	<i>Systemness</i> (Kesisteman)	<i>Decisional autonomy</i> (Otonomi Keputusan)
Attitudinal (Kultural)	<i>Value infusion</i> (Identitas Nilai)	<i>Reification</i> (Citra pada Publik)

Proses pelebagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek

internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Dimensi pelebagaan partai yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam penelitian ini, yang difokuskan pada dimensi pengetahuan publik (*reification*). Alasannya didasarkan bahwa konsep pelebagaan yang diuraikan oleh mereka merupakan hasil perpaduan dari konsep pelebagaan partai yang dikemukakan oleh para ahli. Selain itu, dalam konsepsi ini mencakup pelebagaan internal dan eksternal partai politik. Konsepsi mengenai pelebagaan partai yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand ini kemudian dielaborasi lebih mendalam oleh Surbakti (2003).

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik itu.

Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (*platform*) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Harus dibedakan secara jelas antara mengetahui sosok dan kiprah suatu partai sesuai yang dimaksudkan partai itu dengan sikap setuju atau tidak setuju terhadap sosok dan kiprah partai itu.

Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai itu. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas definisi atau pengetahuan publik mengenai partai itu. Makin luas dan mendalam kiprah suatu partai dalam percaturan politik, makin mudah bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui sosok dan kiprah partai politik itu. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah pengetahuan publik tentang sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai atau *platform* partai yang secara formal dikemukakan pada masyarakat umum? Tampaknya, pengetahuan publik tentang partai politik di Indonesia umumnya berbeda dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan pengurus serta aktivis partai politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai dengan lokus penelitian adalah Partai Golkar Kabupaten Sinjai. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2011, sehingga data-

data hasil penelitian ini dibatasi oleh waktu antara tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode seperti ini lebih dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan analisa deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2010, h. 6).

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, tehnik yang digunakan adalah :

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan karena topik pembahasan penelitian mengenai pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai. Data yang diperoleh melalui dokumen adalah data-data dan dokumentasi yang terkait kegiatan-kegiatan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai, serta notulen-notulen rapat maupun hasil-hasil keputusan Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian.

2. Wawancara

Dalam rangka mencapai informasi yang spesifik dan mendalam, untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus sebagai bentuk konfirmasi atas dokumen-dokumen yang didapatkan melalui dokumentasi, maka wawancara dalam penelitian ini mutlak dilakukan. Wawancara dilakukan secara terfokus, guna efisiensi dan efektivitas waktu dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara telah dilakukan dengan:

- a. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai.
- b. Unsur Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
- c. Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
- d. Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Periode 2009-2014 yang berasal dari Partai Golkar.
- e. Tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pengembangan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai. Selain itu, menggali informasi dari beberapa tokoh masyarakat yang dianggap pernah memiliki hubungan kuat dengan partai, namun saat ini bergabung dan mengarahkan dukungannya dengan partai lain.

3. Observasi langsung

Observasi langsung dilakukan dengan tujuan melihat dinamika Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009 dalam upaya pelebagaan partai. Dalam penelitian ini juga melihat dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan partai secara internal maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Untuk analisis terhadap data yang telah diperoleh, dilakukan dengan mendasarkan kepada asumsi jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat, dengan melalui tahapan dalam bentuk tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam hal ini proses kegiatan analisis data meliputi a) tahap pengumpulan data, b) mereduksi data untuk mendapatkan pokok-pokok tema yang dianggap memiliki relevansi dengan masalah penelitian, c) penilaian data, yang dilakukan dengan cara mengkategorikan data primer dan

data sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan, d) menginterpretasikan data, yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis data yang terkumpul dan pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi, data yang telah diperoleh, diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Sehingga data yang diperoleh bisa menjadi suatu kesimpulan, sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus tentang pelebagaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009. Hal ini tentunya dibatasi oleh tempat dan waktu, di mana data-data yang nantinya disampaikan hanya pada rentang waktu antara tahun 2009-2011. Sehingga hasil temuan dan kesimpulan yang diperoleh tidak bisa dijadikan acuan untuk menggambarkan kondisi Partai Golkar Kabupaten Sinjai sebelum dan setelah rentang waktu tersebut. Demikian pula, hasil penelitian ini tidak menggambarkan kondisi Partai Golkar secara umum di seluruh Indonesia. Begitu pula dalam menganalisis kasus ini, landasan teori yang dijadikan acuan oleh penulis telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang derajat pengetahuan publik terkait dengan keberadaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai. Dalam hal ini terkait dengan imajinasi publik terhadap keberadaan partai yang didasarkan atas fakta dan informasi yang ada akan eksistensi partai tertentu. Keberadaan partai politik akan senantiasa tertanam dalam imajinasi publik ketika partai mampu meyakinkan publik melalui kegiatan nyata yang selalu selaras dengan visi dan platform partai tersebut. Begitu pula sejauhmana partai tersebut secara terus menerus memperkenalkan simbol-simbol partainya kepada publik melalui berbagai kegiatan ataupun cara-cara tertentu yang dapat meyakinkan publik akan keberadaan partai tersebut.

Konsep *reification* pada prinsipnya adalah upaya partai untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin di mata publik. Secara konseptual, partai politik yang mampu mencitrakan dirinya dengan baik di mata publik, akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik. Sebaliknya, jika di mata publik partai tersebut memiliki citra yang tidak diinginkan oleh publik, maka kecenderungan untuk ditinggalkan oleh publik juga akan tinggi. Pada kenyataannya saat ini kita dapat menyaksikan bagaimana partai-partai politik yang ada, terus berupaya untuk tampil sebagai partai yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Upaya pencitraan yang dilakukan oleh partai politik dapat dilakukan melalui proses-proses politik maupun penggunaan simbol-simbol partai di masyarakat.

Olehnya itu, untuk dapat mengidentifikasi pengetahuan publik tentang Partai Golkar Kabupaten Sinjai maka akan akan dilihat mengenai kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam politik lokal berupa keterlibatan partai dalam proses perumusan kebijakan di legislatif dan eksekutif serta dalam konteks keterlibatan dalam pilkada. Melalui aktivitas politik yang dilakukan oleh Partai Golkar

Kabupaten Sinjai akan tercermin bagaimana partai ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya juga akan dilihat sejauhmana kiprah partai di masyarakat berupa penggunaan simbol-simbol partai secara kelembagaan maupun personal partai dalam upaya mengenalkan partainya di masyarakat.

Kiprah Partai dalam Politik Lokal

Partai politik sebagai satu-satunya organisasi yang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sarana perwakilan masyarakat, mempunyai fungsi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Di samping untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, aktifitas partai dalam politik juga diwujudkan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari publik. Karena dengan perjuangan yang didasarkan atas kepentingan masyarakat, akan menanamkan kepercayaan masyarakat akan keberadaan partai tersebut. Dalam konteks ini, partai tentunya menyerahkan tugas ini kepada kader-kader mereka yang memiliki sumberdaya kekuasaan, baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif.

Namun perlu dipahami bahwa, tugas dan wewenang untuk menyuarkan kepentingan masyarakat tidak mesti dilakukan secara individual oleh kader partai yang ada di legislatif. Partai secara kelembagaan seharusnya memiliki peran untuk ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan di legislatif. Artinya bahwa peran untuk merumuskan kebijakan di legislatif tidak serta merta hanya diserahkan kepada kader yang duduk di legislatif, tetapi partai secara kelembagaan harus senantiasa ikut serta dalam proses tersebut. Meskipun pada akhirnya, tetap diserahkan kepada kader yang ada di legislatif, namun prosesnya semestinya melalui keputusan partai secara kolektif. Dengan demikian, akan tercermin bahwa apa yang dilakukan searah dengan ideologi dan platform partai serta kepentingan konstituen, tidak atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kiprah partai di legislatif dan eksekutif

Melalui pelaksanaan pemilu, baik pilukada maupun pemilu legislatif, suatu partai yang mendapatkan dukungan dari masyarakat akan dapat menempatkan kader-kadernya untuk memangku jabatan publik. Melalui Pilukada langsung partai diberikan peluang untuk menjadi wadah pengusung calon pemimpin daerah, dan lewat pemilu legislatif partai politik juga menjadi satu-satunya wadah untuk menempatkan kader-kadernya menjadi wakil rakyat. Pada kedua momentum inilah yang kemudian menjadi pertarungan bagi sebuah partai untuk menarik dukungan dari masyarakat. Akibat membutuhkan dukungan dari masyarakat inilah, maka partai politik akan senantiasa berupaya menunjukkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dibutuhkan upaya dari partai untuk menanamkan kepercayaan dari masyarakat akan keberadaan partai tersebut.

Hal pertama yang dapat dilakukan oleh partai dalam upaya menanamkan kepercayaan dan pemahaman publik terhadap partai adalah melalui kiprah dalam kancah politik lokal. Sebagai wadah perwakilan masyarakat yang dipilih

melalui proses pemilu, anggota legislatif yang berasal dari partai politik harus mampu mengakomodir dan mengagregasikan kepentingan dari masyarakat yang telah memilihnya dalam pemilu. Partai politik secara kelembagaan diberikan kepercayaan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Salah satunya adalah melalui mekanisme perumusan kebijakan di legislatif, di mana segala kebijakan akan senantiasa dirumuskan bersama antara eksekutif dan legislatif. Pada titik inilah peran partai politik akan dinilai oleh publik, melalui keberpihakannya terhadap kepentingan yang diwakilinya.

Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang saat mendudukkan kadernya sebanyak 4 (empat) orang di DPRD Sinjai, memiliki peluang untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya di legislatif. Sementara di eksekutif Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai saat ini menjabat sebagai wakil bupati. Dengan posisi ini, Partai Golkar Kabupaten Sinjai setidaknya memiliki cukup kekuatan untuk mengenalkan partainya di masyarakat melalui wadah ini. Partai Golkar Kabupaten Sinjai sendiri dengan 4 (empat) orang kadernya yang duduk di DPRD Kabupaten Sinjai membentuk fraksi sendiri tanpa melalui koalisi dengan partai lain. Di samping itu sebagai peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2009, juga mendudukkan salah seorang kadernya pada posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD II Sinjai bahwa sebagai upaya partai dalam perumusan kebijakan, maka fraksi merupakan perpanjangan tangan partai di legislatif. Sehingga dalam setiap perumusan kebijakan, fraksi akan senantiasa berkomunikasi dengan pengurus-pengurus partai mengenai sikap partai dalam sebuah perumusan kebijakan. "Jadi kami sebagai perpanjangan partai di legislatif, tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman di partai, apalagi jika ada kegiatan yang sifatnya membutuhkan masukan dari pengurus partai. Misalnya dalam pembahasan pertanggung jawaban pemerintah, hasil pertanggung jawaban tersebut kemudian kami konsultasikan dengan pengurus partai untuk selanjutnya menjadi pandangan umum fraksi" (*wawancara dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sinjai, tanggal 3 Oktober 2011*).

Dalam pandangan umum fraksi tersebut, menurutnya fraksi Partai Golkar akan senantiasa berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan visi dan misi partai. Apalagi dalam setiap rapat paripurna, senantiasa disiarkan secara langsung melalui media radio, sehingga seluruh masyarakat dapat menilai tentang posisi partai dalam merumuskan sebuah kebijakan. Sehingga melalui momentum ini Partai Golkar Kabupaten Sinjai akan berupaya mensinkronkan arah kebijakan partai dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ir. A. Kartini yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar, bahwa dengan keberadaan beberapa kader di legislatif dimanfaatkan sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka pada intinya adalah merupakan

perwakilan masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan senantiasa berorientasi untuk kepentingan masyarakat yang telah mendukungnya. Meskipun secara organisasi, kader-kader yang ada di legislatif juga senantiasa bergerak sesuai dengan arah dan kebijakan partai. Untuk mensinkronkan kepentingan publik dan kepentingan partai inilah, maka dalam setiap proses perumusan kebijakan senantiasa melibatkan pengurus dan kader-kader lainnya yang ada di DPD II sampai kepada pengurus di tingkat di desa.

Penjelasan yang disampaikan oleh narasumber di atas walaupun terkesan sifatnya sangat normatif, namun setidaknya ada upaya dari partai untuk mendengarkan aspirasi dari bawah. Meskipun hal ini juga akan sangat riskan ketika campur tangan partai secara kelembagaan bisa saja mempengaruhi proses yang terjadi di legislatif. Apalagi dipahami bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai merupakan partai pengusung utama bupati pada Pemilu 2008, sehingga sangat dimungkinkan akan senantiasa mendukung kebijakan penguasa. Meskipun hal ini ditampik oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh fraksi di legislatif selalu berorientasi untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Selain secara kelembagaan melalui fraksi di legislatif, hal lain yang dapat dilakukan oleh partai untuk membentuk citra adalah dengan melalui individu-individu dari anggotanya di legislatif. Karena mereka yang terpilih ini tentunya didasarkan atas dukungan yang kuat dari masyarakat. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kecenderungan pemilih dengan sistem pemilu yang ada, lebih menekankan pada keberadaan figur di dalam partai. Figur-figur inilah yang dapat menjadi salah satu simbol partai untuk berperan aktif dalam menanamkan citra di masyarakat. Aktifitas yang dilakukan oleh wakil-wakil ini akan senantiasa beriringan antara kapasitasnya sebagai wakil masyarakat dan kepentingan partai politik yang mengusungnya.

Salah satu yang dapat dilakukan oleh partai adalah melalui eksistensi partai di media publik khususnya bagi wakil-wakil partai yang di legislatif. Dalam artian bahwa semakin sering sosok pengurus memberikan statement yang di media dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat, maka tingkat pengetahuan publik tentang kiprah suatu partai juga akan meningkat. Sebagai contoh ketika ada keluhan-keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Partai Golkar Kabupaten Sinjai melalui wakilnya di legislatif setidaknya berupaya membangun citra di masyarakat melalui komentar atau statementnya di media massa, yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, berita-berita di media lokal yang memuat Partai Golkar Kabupaten Sinjai baik secara kelembagaan maupun personal partai sangat kurang, bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Ketidakmampuan Partai Golkar Kabupaten Sinjai baik secara kelembagaan maupun individu dalam berupaya mengangkat citra partai melalui *statement* di media massa diamini oleh salah seorang mantan anggota DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Sinjai. Menurutnya para anggota DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Sinjai saat ini tidak

mampu menggunakan media sebagai ajang untuk memperkenalkan partai ke masyarakat.

Pola pendekatan melalui media dalam upaya mengangkat citra partai di mata publik dalam kondisi saat ini memang menjadi keharusan bagi partai. Pengembangan wacana dan opini publik di media massa saat ini merupakan bagian dari strategi partai untuk menanamkan eksistensinya di mata publik. Karena melalui medialah merupakan salah satu ajang bagi publik untuk mengetahui sejauhmana partai melakukan aktifitasnya dalam proses-proses perumusan kebijakan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Ketidakmampuan Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam menggalang komunikasi dan bermitra dengan media ini jelas mempengaruhi citra partai tersebut di mata publik. Akibatnya adalah informasi mengenai proses kebijakan yang dilakukan oleh partai tidak diketahui oleh publik secara luas, dan tentunya ini mempengaruhi penilaian publik terhadap keberadaan partai tersebut.

Kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan Pilkada

Seiring dengan proses pemilihan kepala daerah (bupati) secara langsung, peran partai di daerah juga semakin besar. Partai politik yang diberikan kewenangan untuk mengusung pasangan kepala daerah, tentunya berupaya untuk mendudukkan kader partainya menjadi pemimpin di daerah. Namun demikian, partai politik juga tidak serta merta mengabaikan suara dan dukungan dari masyarakat. Karena melalui proses politik inilah, keberadaan partai akan diuji kredibilitasnya melalui arah dukungannya terhadap calon kepala daerah. Ketika partai mengabaikan suara dan dukungan mayoritas masyarakat di daerah, akan dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut memudar.

Dalam pemilihan kepala daerah langsung, Partai Golkar Kabupaten Sinjai senantiasa berupaya mengusung calon-calon yang dianggap memiliki dukungan kuat dari masyarakat. Seperti dalam pelaksanaan pilkada 2008, Partai Golkar Kabupaten Sinjai mengusung calon bupati yang bukan dari kadernya, karena adanya ketentuan konvensi. Walaupun calon yang diusung Partai Golkar Kabupaten Sinjai waktu itu berhasil memenangkan pemilukada, namun akibatnya berimbas ke partai. Imbas yang dimaksud adalah beberapa kader yang tidak sepakat dengan hal itu, memilih untuk keluar dari partai.

Partai Golkar Kabupaten Sinjai sebagai pengusung utama pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada 2008, memiliki peluang besar dalam mengendalikan jalannya pemerintahan di Kabupaten Sinjai. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada Pemilukada 2008, pasangan yang diusung Partai Golkar Kabupaten Sinjai menjadi pemenang dan menempatkan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai menjadi wakil bupati. Dengan posisi ini, seharusnya akan menguntungkan Partai Golkar Kabupaten Sinjai untuk dapat menjadi bagian dari partai yang berkuasa. Karena pada dasarnya partai pengusung sejatinya akan mendapatkan keuntungan lebih ketika kandidat yang diusungnya menjadi pemilu. Salah satunya adalah dapat mengangkat citra partai di mata

masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan di eksekutif.

Kemenangan pasangan yang diusung Partai Golkar Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2008 tidak berimbas pada meningkatnya popularitas dan citra partai di masyarakat. Terbukti bahwa pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, Partai Golkar Kabupaten Sinjai justru mengalami kemerosotan perolehan suara yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan dukungan Partai Golkar Kabupaten Sinjai terhadap paket Kepala Daerah tidak mampu membawa dampak terhadap peningkatan dukungan masyarakat terhadap partai. Dalam artian bahwa citra partai dengan kemenangan dalam pemilu tidak memberikan pengaruh positif kepada partai terkait dengan perolehan suara partai dalam pemilu legislatif.

Menurut salah seorang tokoh Partai Golkar Kabupaten Sinjai bahwa pengalaman yang dialami Partai Golkar Kabupaten Sinjai dengan mengusung kader di luar partai, ternyata berdampak pada kemunduran partai. Bupati yang menjabat saat ini, yang notebene diusung Partai Golkar Kabupaten Sinjai pada kenyataannya justru menjadi bumerang tersendiri bagi Partai Golkar Kabupaten Sinjai. Untuk itu pada pelaksanaan pilkada selanjutnya (Tahun 2013), Partai Golkar Kabupaten Sinjai bertekad untuk mengusung kadernya sendiri sebagai calon bupati. Apalagi untuk saat ini, mekanisme konvensi sudah tidak diberlakukan lagi sehingga membuka peluang besar bagi Partai Golkar Kabupaten Sinjai untuk mengusung kadernya sendiri.

Komitmen pengurus tersebut Partai Golkar Kabupaten Sinjai tentunya mesti dibarengi dengan kesiapan kader partai yang akan diusung. Karena jika merujuk pada pelaksanaan pilkada 2003, ternyata kader partai yang diusung justru tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini patut menjadi perhatian partai, agar dalam kiprahnya dalam pelaksanaan pilkada, tidak hanya sekedar mengusung kepentingan partai. Karena jika Partai Golkar Kabupaten Sinjai tidak selektif dalam hal ini, akan menjadi masalah tersendiri bagi partainya yang belakangan ini mengalami kemunduran yang cukup berarti.

Meskipun demikian beberapa narasumber, walaupun partai berupaya mengajukan kadernya dalam pilkada, tetapi jika calon tersebut tidak kompeten dan tidak mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat maka partai tidak akan memaksakannya. Karena basis yang dilakukan oleh partai dalam mengusung calon bupati adalah berdasarkan hasil survey, baik yang dilakukan oleh internal partai maupun oleh lembaga-lembaga independen. Dengan demikian, dalam hal ini Partai Golkar Kabupaten Sinjai cukup selektif dan tidak terpaksa pada upaya mengajukan kadernya. Bagi Partai Golkar Kabupaten Sinjai, sangat riskan mengusung calon yang tidak didukung oleh publik karena dapat berakibat menurunnya kepercayaan publik terhadap Partai Golkar itu sendiri.

Kiprah Partai di Masyarakat

Salah satu hal yang paling penting dilakukan oleh partai untuk dapat menanamkan pengetahuan publik terhadap eksistensinya dengan melalui kiprah partai di

masyarakat. Kiprah partai di masyarakat adalah dengan melalui kegiatan-kegiatan partai secara kelembagaan maupun personal kader partai. Kegiatan-kegiatan dimaksud dapat berupa pengenalan simbol-simbol partai kepada masyarakat mengenai keberadaan partai. Penggunaan simbol-simbol ini bertujuan untuk menanamkan ideologi dan platform partai, sehingga keberadaan partai tersebut dapat dipahami dan tertanam dalam imajinasi publik.

Upaya Partai Golkar Kabupaten Sinjai untuk mengenalkan eksistensinya lebih banyak dilakukan melalui kegiatan person-person yang ada dalam partai. Hal itupun terbatas pada kiprah dari masing-masing kader sesuai dengan posisi dan jabatan yang dimilikinya. Secara kelembagaan, terkesan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai tidak banyak melakukan kegiatan yang arahnya untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap keberadaan partainya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan cenderung sifatnya sekedar menarik dukungan publik, dan tidak berorientasi bagaimana publik memahami partai atas dasar ideologi dan platformnya. Pemahaman-pemahaman seperti itu terbatas ada kegiatan-kegiatan internal partai, yang juga hanya diikuti oleh kader-kader internalnya.

Sebagai bagian dari simbol partai, figur-figur yang ada dalam partai khususnya sebagai anggota legislatif, nampaknya belum menunjukkan adanya aktivitas yang dapat mempengaruhi sikap publik terkait dengan arah perjuangan partainya. Aktivitas yang dilakukan selama ini terkesan hanya sekedar menonjolkan individunya. Artinya bahwa figuritas mereka inilah yang kemudian dipahami oleh publik, tidak dalam kapasitasnya sebagai orang partai yang berjuang sesuai ideologi dan platform partai. Seperti diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Sinjai dari fraksi Partai Golkar Kabupaten Sinjai:

Jadi menurutnya bahwa aktivitas yang kadang dilakukan oleh person-person yang ada dalam partai adalah lebih mengedepankan keberadaan figur. Masyarakat pemilih umumnya mengidentifikasi partai menurut figur, tanpa didasarkan oleh pemahaman dan kesamaan ideologi atau platform partai. Sehingga jika ideologi atau platform yang ditanamkan ke masyarakat, tidak akan mudah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini berarti memang bahwa citra partai yang dibangun selama ini di masyarakat lebih mengarah pada simbol figur yang ada dalam partai dibandingkan dengan pemahaman ideologi atau platform partai.

Hal demikian pula terlihat dari program dan kegiatan-kegiatan Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang dilakukan selama ini. Dari dokumen kegiatan partai yang berhasil penulis dapatkan, kegiatan partai lebih banyak dihabiskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internal. Misalnya menghadiri pertemuan di DPP atau DPD I, acara pelantikan pengurus, maupun pelatihan-pelatihan di internal partai. Penulis tidak mendapatkan dokumen ataupun pengamatan langsung berupa kegiatan partai di masyarakat yang wujudnya dapat menarik simpati publik dan mengenalkan keberadaan partainya di masyarakat.

Partai Golkar Kabupaten Sinjai terkesan tidak mampu memanfaatkan momentum-momentum tertentu untuk melancarkan kiprahnya di masyarakat. Partai hanya

disibukkan oleh kegiatan yang sifatnya administratif, tanpa adanya upaya untuk mengenalkan simbol-simbol partai di masyarakat secara konsekuen. Seperti pada momen bulan ramadhan tahun lalu, tidak terlihat adanya kegiatan partai yang melakukan safari ramadhan, ataupun pada perayaan hari-hari besar keagamaan ataupun nasional, Partai Golkar Kabupaten Sinjai tidak berupaya memanfaatkan momen itu untuk melakukan kegiatan di masyarakat.

Sangat jarang terlihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang berkaitan dengan pengenalan simbol partai di masyarakat. Kalaupun ada, hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal. Seperti pada saat penelitian dilakukan, Partai Golkar Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan internal partai. Sehingga menurut penulis, kegiatan semacam ini tidak kemudian menguntungkan partai dari sisi pencitraan di mata publik.

Akibatnya, walaupun Partai Golkar merupakan partai lama, namun pada kenyataannya pemahaman masyarakat tentang partai tersebut hanya terbatas pada keberadaan orang-orang (pengurus) yang ada dalam partai. Menurut salah seorang pengurus yang juga anggota DPRD Sinjai dari fraksi Partai Golkar, sangat sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ideologi partai. Mengingat sikap masyarakat yang cenderung melihat dan memahami partai tidak didasarkan pada ideologi, tetapi sosok dari pengurus yang ada di dalam partai. Sehingga ketika misalnya dalam proses kampanye menjelang pemilu, diakuinya pengenalan ideologi, visi misi, dan platform partai hanya sekitar 10%, sementara yang diutamakan adalah bagaimana para kontestan membawa misi pribadinya dalam upaya merebut hati masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai tidak dalam kapasitas memahami dalam kerangka ideologi dan platform partai, tetapi lebih kepada personal-personal yang ada dalam partai. Ini disebabkan kurangnya kegiatan-kegiatan partai yang sifatnya memperjuangkan kepentingan publik yang sesuai dengan arah platform dan program Partai Golkar kurang dilakukan.

Sementara pengakuan salah seorang pengurus Partai Golkar Kabupaten Sinjai bahwa kendala yang dihadapi oleh partai dalam upayanya mengenalkan simbol-simbol partai di masyarakat karena kekuasaan tidak lagi dominan dikendalikan oleh Partai Golkar.

Kendala yang diungkapkan oleh responden di atas, tidak memiliki dasar yang jelas dan ironi dengan kondisi yang ada. Pencitraan partai melalui pengenalan simbol-simbol partai tidak mesti melalui jalur kekuasaan. Kalaupun hal tersebut yang harus dilakukan, Partai Golkar Kabupaten Sinjai setidaknya memiliki kapasitas untuk melakukannya. Karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai merupakan pengusung paket Kepala Daerah, dan mendudukkan ketuanya sebagai wakil bupati. Namun posisi yang strategis ini memang terlihat tidak dimanfaatkan oleh partai untuk menanamkan keyakinan kepada masyarakat akan eksistensi partai di tingkat lokal.

Kurang berfungsinya organisasi-organisasi internal Partai Golkar Kabupaten Sinjai juga setidaknya menjadi kendala partai dalam mengenalkan keberadaan partai di masyarakat. Sebagaimana penjelasan dalam bab sebelumnya, bahwa Partai Golkar sebenarnya memiliki kekuatan pendukung melalui organisasi internalnya, baik organisasi sayap maupun ormas pendiri dan ormas yang didirikan oleh partai. Namun karena keberadaan organisasi ini tidak maksimal, sehingga tidak cukup untuk dapat memberikan dampak yang besar terhadap partai dalam kaitannya dengan penanaman nilai-nilai partai di masyarakat.

KESIMPULAN

Penjelasan yang telah diuraikan dalam bab ini menunjukkan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai belum mampu dipahami oleh publik dengan baik secara kelembagaan. Aktivitas yang dilakukan partai baik di lembaga legislatif maupun eksekutif serta kiprahnya di masyarakat belum menunjukkan eksistensinya sebagai partai yang dapat diidentifikasi dengan baik oleh publik. Kurangnya kegiatan partai dengan menggunakan simbol-simbol partai berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat akan keberadaan partai.

Kegiatan-kegiatan partai yang dilakukan lebih banyak dilakukan dengan menonjolkan figuritas tokoh yang ada di dalam partai. Meskipun hal tersebut bukan berarti suatu hal yang keliru, jika eksistensi figur tersebut mampu mewakili kepentingan partainya. Namun jika melihat hasil temuan menunjukkan bahwa figur-figur tersebut lebih mengedepankan program-program pribadi daripada program yang diusung oleh partai. Sehingga identifikasi masyarakat pun lebih mengarah kepada identifikasi figur-figur yang ada di dalam partai, dibanding keberadaan partai secara kelembagaan.

Meskipun harus diakui pula bahwa kecenderungan mengedepankan figur bagi partai saat ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu yang ada. Di mana dengan sistem pemilu yang ada tersebut, memaksa mereka yang ada di dalam partai bersaing memperebutkan simpati masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Namun bagi penulis, sistem pemilu yang demikian bukan menjadi alasan yang kuat untuk tidak memperjuangkan kepentingan partai secara keseluruhan. Artinya bahwa berjuang untuk mendapatkan dukungan secara pribadi bukan berarti meninggalkan kepentingan partai, tetapi bagaimana meraih dukungan dari masyarakat yang berdampak bagi pengembangan partai ke depannya. Karena jika itu yang terjadi, maka kecenderungan kader-kader partai terkesan hanya menginginkan kekuasaan dan mengabaikan perjuangan partai.

Akhirnya, argumen yang dapat dibangun dari temuan-temuan di atas adalah bahwa untuk dapat membangun citra partai di masyarakat, partai politik harus senantiasa melakukan aktifitas kepartaian yang sejalan dengan arah perjuangan partai. Baik melalui kegiatan rutin partai di ranah legislatif dan eksekutif maupun di masyarakat. Dengan demikian keberadaan partai tersebut tidak hanya harus hadir di masyarakat ketika moment

pemilu atau pemilukada. Namun dengan kegiatan yang terus menerus dilakukan akan dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi partai tersebut.

Konsep perjuangan partai melalui ideologi partai, yang dituangkan lewat program dan platformnya harus dibarengi dengan aksi nyata yang dapat meyakinkan masyarakat. Dan itu dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman kepada publik akan arah perjuangan partai, bukan identifikasi partai yang didasarkan pada dominasi figur tertentu. Karena yang dapat mengenalkan arah perjuangan partai di masyarakat adalah kader-kader yang ada di partai. Sehingga figur-figur partai yang memiliki dukungan kuat di masyarakat, selayaknya lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan pribadinya. Dengan demikian keberadaan partai politik akan senantiasa tertanam dalam imajinasi publik secara terus menerus, yang akan dapat berpengaruh terhadap keputusan publik dalam mengidentifikasi suatu partai. Partai politik yang tidak mampu mencitrakan dirinya dengan baik di masyarakat, cenderung akan ditinggalkan oleh masyarakat ketika partai membutuhkan dukungan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi (Cetakan Ketiga). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwipayana, Ari. 2009. "Demokrasi Biaya Tinggi Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru", dalam *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik UGM*, Volume 12, Nomor 3, Maret 2009, hh. 257-280.
- Eko, Sutoro. 2006. "Krisis Demokrasi Elektoral", dalam Pradjarta Dirjosanjata dan Nico L Kana (eds.). *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Salatiga: Pustaka Percik.
- Hutington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Masa*. Edisi 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Imawan, Riswandha. 2004. *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jari Diri*. Yogyakarta. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada FISIPOL UGM.
- Lay, Cornelis, dkk. 2006. "Organisasi dan Manajemen Kepartaian", dalam *Parpol, Pemilu dan Parlemen: Agenda-Agenda Penguatan Parpol*. Yogyakarta: PLOD UGM & JPP UGM.
- Macridis, Roy C. 1996. "Pengantar, Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai", dalam Dr. Ichlasul Amal (eds.). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mainwaring, Scott, & Mariano Torcal. 2006. "Party System Institutionalization And Party System Theory After The Third Wave of Democratization", dalam Katz, Richard. S dan William Crotty (eds.). *Hand Book of Party Politics*. London: SAGE.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua puluh delapan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD). 2006. *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*. Den Haag: The Netherlands Institute for Multiparty Democracy.
- Randall, Vicky, dan Lars Svasand. 2002. "Party Institutionalization in New Democracies", dalam *Jurnal Party Politics*, Vol.8 No.1, pp. 5-29. London: Sage Publication.
- Ratnawati. 2006. *Sistem Kepartaian di Era Transisi*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Rifai, Anam, dkk (Tim Penyusun). 2010. *Partai Politik, Demokrasi dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Romli, Lili, dkk (Eds.). 2008. *Pelebagaan Partai Politik Pasca Orde Baru (Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PDS)*. Jakarta: LIPI Press.
- S2 PLOD UGM Angkatan XVI. *Bahan Bacaan Utama Mata Kuliah Partai Politik, Pemilu dan Legislasi Daerah*. Yogyakarta: S2 PLOD Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, Purwo. 2006. "Kompotensi Partai Politik Sebagai Pelaku Kebijakan Publik: Kasus Kota Yogyakarta", dalam Pradjarta Dirjosanjata dan Nico L Kana (eds.). *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Salatiga: Pustaka Percik.
- Surbakti, Ramlan. 2003. "Perkembangan Partai Politik di Indonesia", dalam Henk. S Nordholt & G. Anan (eds.). *Indonesia in Transition Work in Progress*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suryadinata, Leo. 2007. *The Decline of the Hegemonic Party System in Indonesia: Golkar after the Fall of Soeharto*. Contemporary Southeast Asia Vol. 29, No. 2, pp. 333-358.
- Syafarani, Tri Rainny. 2008. "Pelebagaan Partai Golongan Karya: Beringin yang Semakin Meranggas, dalam Lili Romli (Eds.). *Pelebagaan Partai Politik Pasca Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PDS*. Jakarta: LIPI Press.
- Tanjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tomsa, Dirk. 2008. *Party Politics and Democratisation in Indonesia; Golkar in the post-Soeharto era*. New York: Routlage 270 Madison Ave.
- Dokumen :**
Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golongan Karya
Kumpulan Peraturan Organisasi (PO), Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Keputusan DPP Partai Golkar 2009-2015.
Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kaderisasi Partai Golkar Tahun 2011.
Hasil-Hasil Rapat Kerja Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan.
Laporan Hasil Pelaksanaan Musyawarah Daerah VIII DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai Tahun 2010.

